

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

a. Letak Geografis Kabupaten Jombang

Sesuai dalam Katalog BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi Jalan Arteri Primer Surabaya - Madiun dan Jalan Kolektor Primer Malang - Babat. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah wisata dan kota pelajar serta kota industri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan

Secara goeografis Kabupaten Jombang terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara 50 20' 01" sampai 50 30' 01" Bujur Timur dan 070 24' 01" dan 070 45' 01" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km2. Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian + 44 m diatas permukaan laut.

Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu :

- a. Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.
- b. Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kesamben.
- c. Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam.

b. Keadaan Penduduk

Sesuai dalam Katalog BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2009 dengan paradigma baru, tujuan pembangunan Nasional adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari paradigma baru tersebut tergambar jelas bahwa penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan. Sehingga data kependudukan merupakan piranti yang sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah sosial yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil Registrasi jumlah penduduk Kabupaten Jombang akhir tahun 2008 sebesar 1.343.358 jiwa. Dari 21 Kecamatan yang ada di

Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 147.899 jiwa atau 11,01 persen dari total penduduk Kabupaten Jombang. Kepadatan penduduk Kabupaten Jombang sedikit meningkat dari 1.013 jiwa/km² pada tahun 2007 menjadi 1.159 jiwa/km² pada tahun 2008.

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jombang sebagai Ibukota Kabupaten dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Wonosalan, Kabuh, Plandaan dan Ngusikan. Sex ratio yang merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan dikalikan seratus, menunjukkan bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Jombang 2008 adalah 100,47 artinya setiap 10.000 penduduk perempuan terdapat 10.047 penduduk laki-laki.

c. Sistem Pemerintahan

Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma – norma tertentu. Sesuai dengan data BPS “Kabupaten Jombang dalam angka tahun 2009” disebutkan bahwa secara administrasi Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 21 desa. Namun bila ditinjau dari luas wilayah, terdapat 3 Kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan

Wonosalam dengan luas 121,63 Km², Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km² dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 Km².

d. Keuangan Daerah

Sesuai dengan data BPS “Kabupaten Jombang dalam angka tahun 2009” disebutkan bahwa roda pemerintahan dan pembangunan di daerah tidak akan pernah bergerak kalau tidak ada dana/anggaran pendapatan dan belanja yang cukup memadai. Sesuai dengan syarat pembangunan yang berkelanjutan, maka pemerintah daerah akan senantiasa meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Pada tahun anggaran 2008, anggaran penerimaan total ditetapkan sebesar Rp. 808.379.708.662,- atau Rp 808 M. Penerimaan terbesar berasal dari bagian Dana Perimbangan yang mencapai Rp. 672.614.858.969,-. Bandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang hanya sebesar Rp 97.601.053.867,-

2. Gambaran Umum Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

a. Letak Geografis Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Sesuai dalam buku RPJMDes, Desa Pucangro terletak di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang memiliki luas administrasi 380,410 Ha, yang terbagi menjadi 8 (delapan) dusun yaitu :

1. Dusun Gamongan,
2. Dusun Pucangro,
3. Dusun Cangkring Malang,
4. Dusun Sidomukti,
5. Dusun Sidomulyo,
6. Dusun Sidodadi,
7. Dusun Berjel,
8. Dusun Kwayuhan.

Dengan batas – batas administratif sebagai berikut :

Utara : Desa Kedungturi, Kecamatan Gudo

Selatan : Desa Dungus, Kabupaten Kediri

Barat : Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo

Timur : Desa Polorjo, Kecamatan Ngoro

Pola pembangunan lahan di desa Pucangro lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan pengairan tadah hujan. Secara umum kondisi fisik desa Pucangro memiliki kesamaan dengan desa – desa lain di wilayah kecamatan Gudo. Desa Pucangro merupakan daerah dataran sedang yang memiliki luas wilayah 380.410 Ha yang terbagi dalam tiga fungsi penggunaan yaitu tanah pekarangan atau pemukiman, sawah dan tegal/ladang.

b. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa yang tercatat di dalam buku RPJMDesa tahun 2010 :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Pucangro Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki – Laki	2696 Jiwa
2.	Perempuan	5416 Jiwa
Total : 8112 Jiwa		

Sumber Data Desa Pucangro Kecamatan Gudo, 2010

Dari tabel 7 tersebut menunjukkan jumlah penduduk lebih besar dari penduduk laki – laki. Walaupun lebih besar, tetapi dalam penyebaran antar dusun tidak sama.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Pucangro Menurut Agama Tahun 2010

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	8092 Jiwa
2.	Kristen Protestan	- Jiwa
3.	Katolik	20 Jiwa
4.	Hindu	- Jiwa
5.	Budha	- Jiwa
Total : 8112 Jiwa		

Sumber Data Monografi Desa Pucangro Kecamatan Gudo, 2010

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa di Desa Pucangro Kecamatan Gudo penduduk yang memeluk agama Islam mencapai jumlah 8092 jiwa sehingga aspek kehidupan agama Islam sangat

mewarnai sikap dan tingkah laku masyarakatnya, juga upacara keagamaan atau selamatan yang masih banyak dilakukan dari generasi ke generasi serta menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap alim ulama atau kyai.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa Pucangro Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2010

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri	55 Orang
2.	TNI / POLRI	10 Orang
3.	Karyawan Swasta	350 Orang
4.	Wiraswasta / Pedagang	175 Orang
5.	Tani	970 Orang
6.	Buruh Tani	1300 Orang
7.	Pertukangan	67 Orang
8.	Pensiunan	75 Orang
9.	Jasa	77 Orang
10.	Lain – lain	50 Orang

Sumber Data Desa Pucangro Kecamatan Gudo, 2010

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun Desa Pucangro sekitar 2541 atau hampir 30%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Pucangro termasuk tinggi. Dari jumlah 1620 KK, sejumlah 118 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 452 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 393 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 584 KK tercatat Keluarga Sejahtera III, 16 KK tercatat sebagai Sejahtera III plus. Jika KK

golongan Pra – Sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 35 % KK Desa Pucangro adalah keluarga miskin.

Secara geografis Desa Pucangro terletak pada posisi 7°38'-25' Lintang Selatan dan 112°11'35' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 75m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jombang tahun 2004 curah hujan di Desa Pucangro rata – rata mencapai 1.750 mm. Curah hujan terbanyak pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000 – 2009.

Secara administratif, Desa Pucangro terletak di wilayah Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa – desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungturi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa bugasu Kedaleman Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ngoro. Jarak tempuh Desa Pucangro ke Kecamatan Gudo sekitar 8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Jombang adalah 14 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

c. Sistem Pemerintahan

Sesuai dengan RPJMDes Pucangro, Desa Pucangro terdiri dari 8 Dusun yang masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limbah tugas desa kepada aparat tersebut. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pucangro, dari 8 Dusun tersebut terbagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan 32 Rukun Tetangga (RT).

d. Visi dan Misi Desa Pucangro

1) Visi Desa Pucangro

Visi adalah gambaran mengenai masa depan dan masa sekarang dengan dasar dan logika secara bersamaan selanjutnya memberi ilham dan naluri yang mensyaratkan harapan serta kebanggaan apabila berhasil. Untuk itu Pemerintah Desa Pucangro dalam mencapai cita – citanya memiliki visi “*Mewujudkan Desa Pucangro Yang Makmur dan Sejahtera*”.

2) Misi Desa Pucangro

Misi adalah kebutuhan tekad tentang spesifikasi tujuan, arah pemanfaatan sumber daya dari visi agar salah satu tujuan atau arah kegiatan dapat direncanakan sesuai dengan cita – cita yang di inginkan. Maka untuk mencapai visi diatas Pemerintah Desa Pucangro mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendidikan masyarakat,

2. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat,
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat,
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat,
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga,
6. Meningkatkan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa,
7. Mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri,
8. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara masyarakat, aparat pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa dalam melaksanakan pembangunan,
9. Mewujudkan Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang menjadi desa yang selalu terdepan dalam melaksanakan program pembangunan dengan memanfaatkan sektor – sektor unggulan.

e. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan organisasi Pemerintahan Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa. Susunan Organisasi dan Pemerintahan Desa dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 Bab II dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - 3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Staf Desa dan Kepala Dusun;
 - 4) Jumlah Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 3 orang dan maksimal 5 orang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Pemerintah Desa Pucangro adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mempunyai tugas dalam Bab III tentang Kepala Desa Bagian Pertama Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Pasal 4 :
 1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 2. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa termasuk APB Desa untuk disahkan dan ditetapkan bersama BPD;
 3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 4. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 5. Membina perekonomian Desa;

6. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Perangkat Desa mempunyai tugas dalam Bab IV tentang Perangkat Desa Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 35 :

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangannya ;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

c. Sekretaris Desa mempunyai tugas dan fungsi sesuai dalam Bab V tentang Sekretaris Desa Bagian Kedua Tugas dan Kedudukan Sekretaris Desa Pasal 41:

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan rumah tangga Desa;
- b) Melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha dan perlengkapan;

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Sekretaris Desa mempunyai fungsi menjalankan administrasi Pemerintah Desa, pembangunan dan urusan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Staf Desa:

1. Staf Desa Urusan Pemerintahan

- a) Menginventarisasi, mensistematisasikan dan menganalisa data dibidang pemerintahan dan sosial politik,
- b) Menginventarisasi data Aparat Pemerintah Desa,
- c) Menyusun program penyelenggara pemerintahan, pembinaan sosial politik dan ideologi Negara,
- d) Mempersiapkan pedoman dan petunjuk tentang Pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa (pemilihan Kepala Dusun). Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- e) Memproses keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,
- f) Melakukan pembinaan dibidang kependudukan, ketenagakerjaan, Pemilu dan lembaga kemasyarakatan,
- g) Memberikan pelayanan masyarakat dibidang kependudukan dan pertahanan,
- h) Mempersiapkan dan menyusun data monografi desa,

- i) Menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data guna penyusunan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa,
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

2. Staf Desa Urusan Pembangunan

- a) Menginventarisasi, mensistematiskan dan menganalisa data dibidang pembangunan Desa,
- b) Menginventarisasi dan menelaah bidang pembangunan Desa,
- c) Menyusun program pembangunan Desa, melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan,
- d) Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,
- e) Memberikan pelayanan masyarakat dibidang perizinan,
- f) Menyusun pelaksanaan pembagian air, membina kader – kader pengairan serta Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA),
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

3. Staf Desa Urusan Kesejahteraan

- a) Membantu proses dan mengadakan pencatatan atau pendataan tentang kelahiran, kematian, nikah, talak dan rujuk,

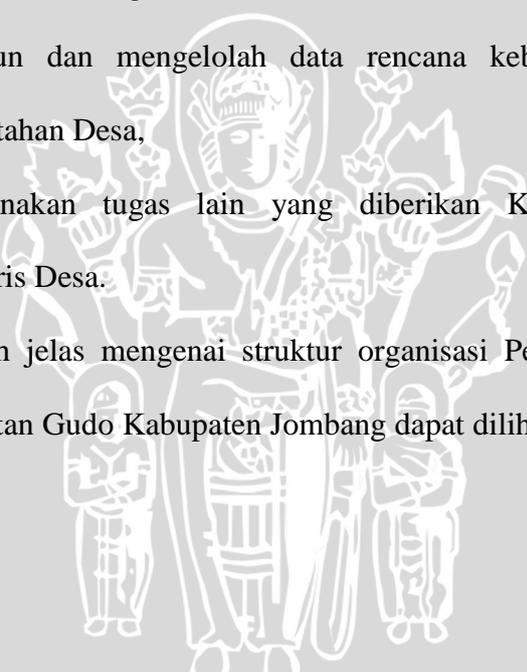
- b) Membantu proses penyaluran bantuan pada korban bencana alam,
- c) Menghimpun dan menyalurkan dana sosial untuk bantuan penderita cacat, panti asuhan, keluarga prasejahtera dan badan – badan sosial lainnya,
- d) Membantu proses penyaluran dana pada keluarga miskin,
- e) Melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana,
- f) Menginventarisasi, mensistematikan dan menganalisa data untuk kepentingan sosial budaya,
- g) Melaksanakan pembinaa kepada organisasi kepemudaan, kesenian dan olahraga,
- h) Melakukan pembinaan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup beragama, pendidikan dan kebudayaan,
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

4. Staf Desa Urusan Umum

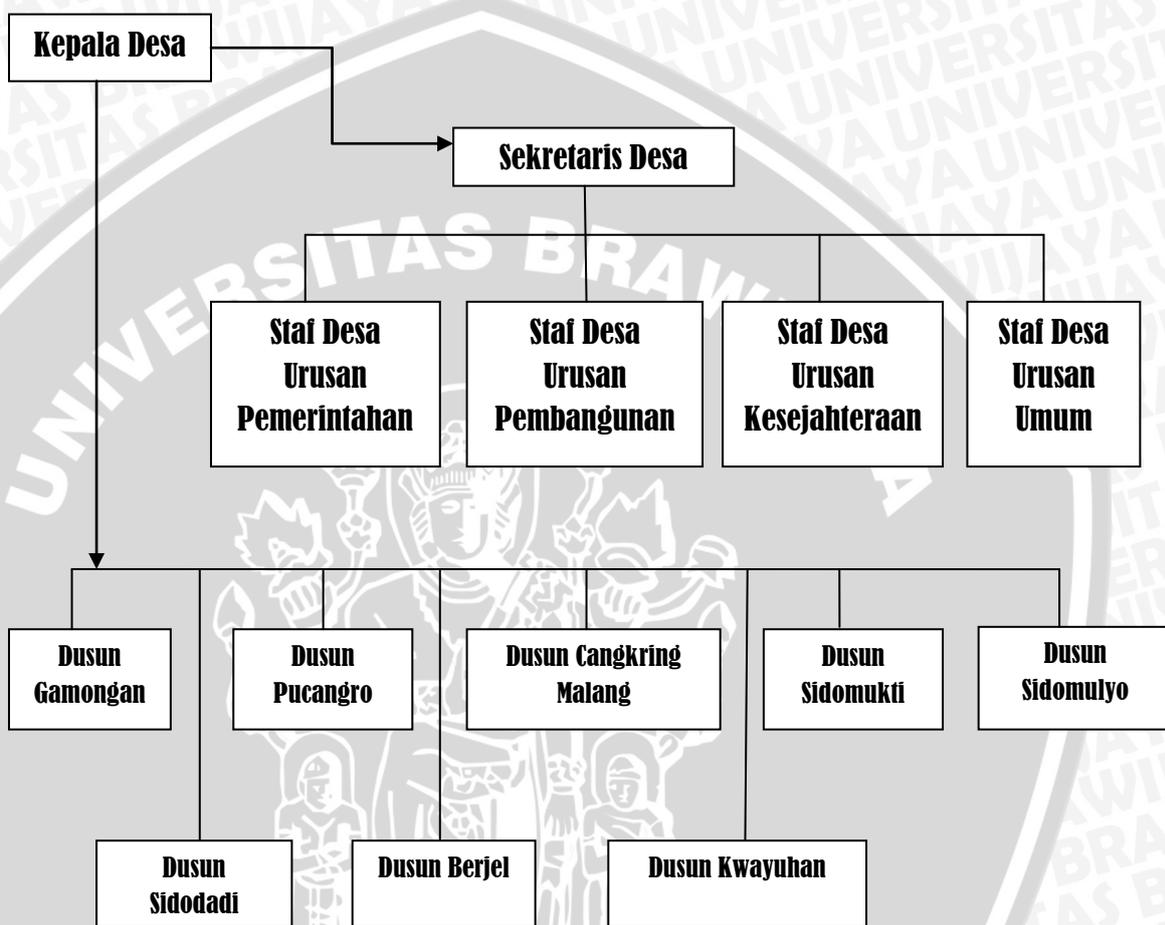
- a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor desa,
- b) Mempersiapkan pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas,

- c) Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat desa,
- d) Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor desa,
- e) Menyelenggarakan perbaikan kantor desa dan bangunan milik Desa serta urusan kendaraan dinas,
- f) Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisasi data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa,
- g) Menyusun dan mengelolah data rencana kebutuhan Aparatur Pemerintahan Desa,
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Pemerintahan Desa Puangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2
Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pucangro
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang



Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

B. Data Fokus

1. Efektifitas dana pembangunan fisik di Desa Pucangro Kecamatan

Gudo Kabupaten Jombang

a. Kegiatan pembangunan fisik desa

Kegiatan pembangunan fisik merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang sarana prasana masyarakat agar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat dirasakan secara optimal. Kegiatan pembangunan fisik itu sendiri dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya terkait ulasan tentang pembangunan fisik desa peneliti mengadakan wawancara kepada Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa ditempat kerjanya memaparkan bahwa :

“Pembangunan fisik adalah pembangunan infrastruktur yang ada di desa dan dinikmati secara langsung untuk kepentingan masyarakat sehingga alokasi dana yang masuk di desa bisa di realisasikan dalam bentuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, tembok penahanan tanah (TPT)”. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 16 November 2013, pukul 08.30 WIB)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Fitriyah selaku staf umum ditempat kerjanya menjelaskan bahwa :

“Pembangunan fisik adalah pembangunan infrastruktur pedesaan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dimana pembangunan fisik juga bersama – sama sebelumnya diadakan musyawarah mufakat dan gotong royong yang merupakan jalan hidup bermasyarakat”. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 16 November 2013, pukul 09.30 WIB)

Dalam menunjang pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana maka pihak desa menyediakan pembangunan fisik. Sarana dan prasarana yang disediakan antara lain pembangunan jalan rabat beton, penahan tanah, tembok pagar TK dan lain-lain. Sesuai menurut Ibu Fitriyah tentang kegiatan pembangunan di tempat kerjanya:

“Contohnya saya ambil dari pembngunan jalan aja ya.. Untuk tahun 2012 pembangunan jalan di dusun sidomulyo dana dari ADD”. (Wawancara pada hari Senin tanggal 18 November 2013, pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut lagi sejalan dengan pemikiran Ibu Fitriyah selaku staf umum tentang kegiatan pembangunan fisik desa, maka selanjutnya menurut Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa ditempat kerjanya menjelaskan bahwa :

“Pembangunan yang dilakukan desa pucangro dana dari ADD pada tahun 2012 pembangunan dalam bentuk jalan rabat beton dusun sidmulyo, sidodadi, pucangro sesuai realisasi akhir tahun anggaran.. contoh pembangunan fisik tersebut mengacu pada salah satu sumber dana dari ADD, terkait dengan pembangunan yang lainnya berdasarkan usulan dari masyarakat, disana ada musyawarah dusun katakanlah bisa disingkat musdus setelah musdus nanti akan dibawa ke desa seperti musdes contohnya seperti pembangunan jalan tersebut akan dibangun dimana itu kan melalui musyawarah desa untuk bantuan yang lain seperti PNPM akhirnya nanti dari musdes akhirnya dibawa ke musrembang tingkat kecamatan”. (wawancara pada hari Senin tanggal 18 November 2013, pukul 09.30 WIB).

Kegiatan pembangunan fisik desa tersebut semua berasal dari usulan masyarakat dan koreksi atau kebutuhan pembangunan yang di lihat oleh pihak desa sesuai RPJM tahun 2011 - 2015. Keterangan kegiatan pembangunan fisik tersebut dapat ditunjang dari wawancara yang dilakukan

peneliti pada Ibu Fitriyah selaku staf umum ditempat kerjanya menyatakan bahwa :

“Ya betul sekali pembangunan tersebut dipetik dari RPJMDesa Tahun 2011 – 2015 yang jangkanya 5 Tahun.. pembangunan fisik tersebut usulan dari masyarakat yang mana sebelum dibawa ke RPJMDesa itu adanya usulan dari masyarakat yang namanya musyawarah dusun kemudian ditampung dari dusun dibawa ke desa adanya musyawarah desa.. istilahnya musrembangdes, nanti dari tiap – tiap dusun mengusulkan atau mengutarakan keluhan pembangunan dusunnya masing – masing yang belum tercapai. Jadi nanti di desa di ambil lagi, diforum tersebut diambil sekala prioritas yang paling parah di dusun dengan kesepakatan semua yang ikut dalam musyawarah tersebut termasuk RT, RW, Kasun, tokoh masyarakat semua ada disitu”. (wawancara pada hari Senin tanggal 18 November 2013, pukul 11.00 WIB).

Hal serupa dijelaskan juga oleh Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa ditempat kerjanya memaparkan bahwa :

“Pembangunan fisik tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa artinya kita musyawarah desa untuk mendapatkan suatu prioritas dusun mana yang harus dibangun akhirnya musyawarah desa, terkait dengan usulan masyarakat artinya disini kan ada 8 dusun kita kan gak mungkin nunjuk salah satu dusun sehingga kita akhirnya membuat musyawarah desa desa mana yang akan dibangun dulu skala prioritas mana yang lebih penting kalo yang tidak penting kan tidak usah dibangun dulu yang lebih penting yang dibangun menurut skala prioritasnya nilainya kalo gak salah 5 skala prioritas.. 5 nilai sakala prioritas itu artinya begini tidak teralalu penting nilainya 1, kita mengadakan musdes katakanlah sesama masyarakat dusun rundingan dusun pembangunan mana yang akan dibangun dan diprioritaskan dengan nilai 5 itu tadi, kalau memang tidak harus dibangun bisa dibangun untuk tahun berikutnya kalau tidak dibuat begitu kadang – kadang salah satu dusun minta didahulukan pembangunan tersebut saya dulu saya dulu akhirnya desa kerepotan akhirnya kesepakatan untuk kepala dusun katakanlah dusun ini yang dibangun yang kadang kala banjir pada waktu hujan seperti TPT otomatis ke sawah akhirnya kebanjiran”. (wawancara pada hari Senin tanggal 18 November 2013, pukul 11.30 WIB).

Dan berikut pada tabel 5 adalah daftar pembangunan fisik desa tahun 2010 Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang :

Tabel 5
Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Diserahkan
Kepada Desa Tahun 2010

Pelaksanaan Kegiatan	Volume (M²)	Besar Dana (Rp)	Sumber Dana
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Sidomulyo	300 M ²	Rp. 59.586.105	APBD Kabupaten Jombang (ADD)
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dsn. Sidomulyo	3 Unit	Rp. 9.000.000	APBD Kabupaten Jombang (GERTAK)
Pemugaran Rumah Dsn. Gamongan dan Dsn. Sidomukti	2 Unit	Rp. 6.500.000	APBD Kabupaten Jombang (P2SPP)
Total : Rp 75.086.105			

Sumber : Laporan APBDes Tahun 2010 (diolah)

Dari tabel 5 dijelaskan bahwa terdapat tiga pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diserahkan kepada desa, agar kehidupan masyarakat dapat terpenuhi secara layak. Kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan merupakan sumber dana dari pemerintah melalui mekanisme pengajuan anggaran dan rencana kegiatan dari desa.

Selanjutnya pada tabel 6 adalah daftar pembangunan fisik desa tahun 2011 Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang :

Tabel 6
Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Diserahkan
Kepada Desa Tahun 2011

Pelaksanaan Kegiatan	Volume (M²)	Besar Dana (Rp)	Sumber Dana
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Sidodadi	303 x 1 x 0,3 M ²	Rp. 60.689.000	APBD Kabupaten Jombang (PNPM)
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Pucangro	450 x 2,5 x 0,1 M ²	Rp. 70.000.000	APBD Kabupaten Jombang (P2SPP)
Pembangunan Jalan Dsn. Berjel	42 M ²	Rp. 22.709.000	Swadaya Masyarakat
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Sidomulyo	300 x 2,5 x 0,1 M ²	Rp. 59.586.000	APBD Kabupaten Jombang
Alokasi dan Realisasi Anggaran : 103.403.000			

Sumber : Laporan APBDes Tahun 2011 (diolah)

Pada tabel 6 dijelaskan bahwa urusan pemerintah kabupaten kepada desa terdapat 4 kegiatan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan fisik yang membutuhkan kucuran dana paling banyak adalah pembangunan jalan rabat beton Dusun Pucangro sebesar Rp. 70.000.000 dibiayai oleh APBD Jombang (P2SPP), dan yang membutuhkan kucuran dana paling sedikit adalah pembangunan jalan Dusun Berjel sebesar Rp. 22.709.000 dana berasal dari swadaya masyarakat.

Kemudian pada tabel 7 adalah daftar pembangunan fisik desa tahun 2012 Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang :

Tabel 7

**Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Diserahkan
Kepada Desa Tahun 2012**

Pelaksanaan Kegiatan	Volume (M²)	Besar Dana (Rp)	Sumber Dana
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Sidomulyo	400 x 2,5 x 8 M ²	Rp. 59.585.000	APBD Kabupaten Jombang (ADD)
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Sidodadi	617 x 2,5 x 8 M ²	Rp. 67.350.000	APBD Kabupaten Jombang (P2SPP)
Pembangunan TPT Dsn. Pucangro	200 x 1 M ²	Rp. 50.000.000	APBD Kabupaten Jombang (Dinas Pertanian)
Pembangunan Tembok Pagar Gedung TK Dsn. Pucangro	60 x 2,5 M ²	Rp. 24.500.000	APBD Kabupaten Jombang (Dana Stimulan Khusus)
Pembangunan Bedah Rumah Dsn. Sidodadi	1 Unit	Rp. 8.000.000	APBD Kabupaten Jombang (P2SPP)
Total : Rp 106.403.000			

Sumber : Laporan APBDes Tahun 2012 (diolah)

Berdasarkan data di atas bahwa kegiatan pembangunan fisik di desa Pucangro seperti yang ditungkan dalam buku APBDes tahun 2010 sampai 2012 yaitu membangun jalan rabat beton, tembok penahan tanah, tembok pagar TK, dll. Kegiatan pembangunan fisik tersebut mendapat bantuan dana dari pemerintah yang mempunyai sumber dana tersendiri, ada yang dari ADD, PNPM-Mandiri, dana stimulan khusus. Pembangunan fisik tersebut dilakukan dengan melihat seberapa besar tingkat pemenuhan kebutuhan yang harus segera dipenuhi agar bisa layak digunakan untuk kelancaran transportasi dan kelayakan masyarakat menikmati pembangunan fisik.

b. Target dan realisasi dana untuk pembangunan fisik desa

Dalam pembangunan fisik desa Pucangro pasti sudah ditentukan target dan realisasi dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan fisik tersebut. Sumber dana yang berasal dari pemerintah tersebut tentu direkap dengan sebaik – baiknya dalam buku anggaran desa. Untuk lebih jelasnya maka peneliti melakukan wawancara kepada staf di Kantor Balai Desa Pucangro.

Penerimaan atau sumber – sumber dana pembangunan fisik desa Pucangro tersebut dijelaskan oleh Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa pucangro menyatakan bahwa :

“Sumber dana pembangunan tersebut dari pemerintah itu banyak mbak, diantaranya sumber dana pembangunan desa ada yang berasal dari ADD, PNPM, stimulan khusus, DAK (Dana Alokasi Keuangan), ada murni swadaya masyarakat. tetapi kalau untuk sementara ini untuk murni swadaya masyarakat itu tidak ada artinya gak hanya swadaya uang itu bisa tenaga kerja bisa kayak material. Sumber dana tersebut dituangkan ke dalam APBDDes untuk dibuat realisasi untuk laporan akhir tahun”. (wawancara pada hari Selasa tanggal 19 November 2013, pukul 09.30 WIB).

Penjelasan tentang sumber dana tersebut senada dengan pendapat dari Ibu Fitriyah selaku staf umum ditempat kerjanya memaparkan bahwa :

“Untuk pembangunan fisik itu memang ada dari baik itu pemerintah pusat itu ada seperti PNPM MP, P2SPP dari pemerintah pusat langsung itu tidak masuk rekening desa yang masuk rekening desa yang hanya masuk rekening desa seperti ADD, dana stimulan khusus, penyerahan urusan itu masuk langsung.. yang tidak langsung masuk rekening iku PNPM sama P2SPP nanti ada pemebritahuan desa ini dapat itupun nanti tahunnya lewat kecamatan, berarti pemerintah turun ke kecamatan lalu turun ke desa.. Buku rekap dana pembangunan ada, buku laporan realisasi anggaran ada, buku untuk pembangunan tiap tahun itu ada dari mana dana yang terserap pembangunan alokasi dana ada, Kemudian dana tersebut direkap dalam APBDDes baru ke LRA (Laporan Realisasi Anggaran). APBDDes tersebut dana yang betul-betul sudah pasti terlearisasi pada tahun itu, LRA rincian pertanggungjawaban keuangan dari APBDDes tersebut

sedangkan APBDes kan global LRA rincian dana seluruhnya”. (wawancara pada hari Selasa tanggal 19 November 2013, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dana pembangunan fisik desa dapat berupa materi atau non materi. Dana yang berasal dari pemerintah bermacam – macam, contohnya saja ADD, PNPM, P2SPP. Selanjutnya dana yang berasal dari non pemerintah yaitu swadaya masyarakat yang dapat menyumbangkan berupa materi atau tenaga kerjanya. Kemudian rincian dari sumber dana tersebut direkap dalam buku anggaran APBDes dan direkap lagi secara rinci dalam LRA (Laporan Akhir Keuangan).

Terkait sumber dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut untuk sebuah kegiatan pembangunan tentunya suatu mekanisme atau proses pengucuran dana sehingga dana yang diajukan terealisasi. Proses realisasi dana tersebut dari data wawancara peneliti menurut Ibu Fitriyah selaku staf umum ditempat kerjanya menyatakan bahwa :

“Proses realisasinya langsung ke desa, desa kan ada tim pelaksana yang disebut LPMD.. Realisasi dana dari pusat langsung turun lewat rekening desa, bendahara mengambil kemudian bendahara langsung merealisasikan ke desa. Sebelum itu kita mengajukan RAP dulu, DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) , Rencana Anggaran Biaya itu nanti kita ajukan ke pemerintah kabupaten. Nanti disana di verisifikasi dulu di cheklist kalo memang sudah oke langsung ditanda tangani dari sana dikembalikan ke desa dan tinggal nunggu rencana”. (wawancara pada hari Selasa tanggal 19 November 2013, pukul 10.30 WIB)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa ditempat kerjanya memaparkan bahwa :

“Mekanisme realisasi dana tersebut bahwa awal dari masyarakat desa kemudian dibuat rencana anggaran biaya akhirnya semua tahu rencananya apa saja untuk mendapatkan persetujuan misalnya seperti pembangunan jalan itu harus mendapat persetujuan dari BPD dan Kepala Desa, BPD tersebut termasuk mitra dalam pemerintahan desa untuk dimasukkan ke dalam APBDes”. (wawancara pada hari Selasa tanggal 19 November 2013, pukul 11.00 WIB)

Mekanisme pencairan dana tersebut dari pemerintah pusat turun ke desa terdapat banyak tahapan – tahapan yang harus dilalui. Sebelum pencairan dana tersebut ada namanya rencana biaya yang sudah diajukan desa kemudian diseleksi dahulu. Apabila sudah memenuhi sesuai dengan kebutuhan maka dana akan direalisasikan. Dalam realisasi dana tersebut tentunya mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Peneliti mengambil data dari tahun 2010, 2011, 2012.

Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara terkait dengan perkembangan realisasi dana dari tahun 2010 sampai 2012 dengan Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa ditempat kerjanya menyatakan bahwa :

“Realisasi pembangunan dari dana tersebut contohnya saja pada tahun 2011 saja kita membangun TPT (tembok penahan tanah) dusun sidodadi skala prioritas membangun TPT adalah untuk mencegah banjir di sidodadi kan dekat sekolah SD selama ini kalau banjir anak-anak sekolah kan tidak bisa masuk sekolah kadang – kadang tidak pakai sepatu membawa tas kresek . Dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan realisasi dana tersebut karena dana tersebut sudah disetujui dan direalisasikan sehingga sesuai target”. (wawancara pada hari Rabu tanggal 20 November 2013, pukul 09.00 WIB)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Fitriyah selaku staf umum memaparkan bahwa :

“Pencapaian pembangunan dari tahun 2010 sampai tahun 2012 ada peningkatan karena setiap tahun dana di Desa Pucangro Alhamdulillah mendapat tambahan tidak harus dari APBD saja, efeknya pembangunan kan tujuannya untuk tercapainya pembangunan fisik lainnya yang belum dilaksanakan”. (wawancara pada hari Rabu tanggal 20 November 2013, pukul 09.15 WIB)

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa perkembangan realisasi dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2012. Peningkatan realisasi dana tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Realisasi APBDes Desa Pucangro Tahun 2010

Uraian	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Pendapatan	Rp. 162.287.260	Rp. 171.287.260	105, 54 %
Belanja	Rp. 162.287.260	Rp. 171.287.260	105, 54 %

Sumber : Laporan APBDes Tahun 2010 (diolah)

Dari tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa dana yang diterima dengan dana yang dikeluarkan mengalami prosentasi yang sama. Selanjutnya perbandingan dana pembangunan dapat di lihat pada tabel 9 dibawah ini :

Tabel 9
Realisasi APBDes Desa Pucangro Tahun 2011

Uraian	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Pendapatan	Rp. 164.787.258	Rp. 204.051.758	123,82 %
Belanja	Rp. 164.783.500	Rp. 204.048.000	123,82 %

Sumber : Laporan APBDes Tahun 2011 (diolah)

Kemudian pada tabel 9 dijelaskan bahwa realisasi anggaran dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya mengalami peningkatan dari total pengajuan anggaran pendapatan Rp 164.787.258 tetapi realisasi dana pendapatan tersebut mencapai Rp 204.051.758. Akan tetapi, total belanja sebesar Rp 204.048.000 ditahun 2011. Selanjutnya target dan realisasi dana pembangunan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10

Realisasi APBDes Desa Pucangro Tahun 2012

Uraian	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Pendapatan	Rp. 231.751.756	Rp. 248.999.624	107,44 %
Belanja	Rp. 231.879.186	Rp. 249.127.052	107,44 %

Sumber : Laporan APBDes Tahun 2012 (diolah)

Dalam tabel 6 dijelaskan bahwa mengalami peningkatan jumlah pendapatan dari tahun sebelumnya. Namun, terdapat pengeluaran yang lebih ditandai dengan selisih kurang lebih Rp. 1.000.000 . Total belanja tersebut digunakan untuk program kegiatan pembangunan dan belanja pegawai.

Dari uraian tabel diatas, menyebutkan bahwa realisasi dana pada tahun 2010 telah memenuhi target sebesar 105,54%, tahun 2011 memenuhi target sebesar 123,82% dan tahun 2012 memenuhi target sebesar 107,44%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengalami peningkatan terlihat jelas bahwa pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 105,54%, tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 123,82%. Tetapi pada

tahun 2012 mengalami penurunan, akan tetapi realisasi tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar 107,44%.

c. Pelaksanaan pembangunan fisik desa

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa Pucangro sudah memenuhi target dan realisasi yang tercatat dalam daftar pembangunan fisik. Pembangunan fisik dari dana yang sudah ditargetkan dapat dilihat realisasinya, misalnya pada tahun 2012 pembangunan berjalan secara terus menerus dan dana pembangunan tidak melebihi dari target yang sudah ditentukan. Sesuai keterangan yang diungkap oleh Ibu Fitriyah selaku staf umum ditempat kerjanya sebagai berikut :

“Target dan realisasi dana pembangunan tersebut seimbang memenuhi antara target dan realisasi sudah sesuai karena targetnya kan adanya RAP, nah terselesainya dana juga mengacu pada RAP tersebut”. (wawancara pada hari Kamis tanggal 21 November 2013, pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya, penjelasan serupa dikemukakan oleh Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa ditempat kerjanya menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pembangunan fisik contoh saja di tahun 2012 sudah memenuhi target. Sesuai target artinya begini mbak, target pertama diadakan dengan musyawarah desa dengan musyawarah tersebut itu targetnya ya dusun yang telah disusulkan katakanlah dusun sidomulyo dan sidodadi sesuai kesepakatan dusun saya sudah katakan tadi menurut skala prioritas, disini dusun sidodadi akan membangun sarana fisik artinya dana untuk dusun sidodadi harus diprioritaskan pada dusun itu saja tidak boleh mengembang kalo mengembang artinya dana tersebut tidak mencukupi dengan panjang dan lebar sesuai RAP yang diajukan. Dari rencana dan realisasi tersebut sudah sesuai, artinya sesuai dengan RAP sebesar dana itu harus sesuai dengan RAP sekian yang sudah direncanakan tidak boleh melebihi Rap, kadang kita mengajukan katakanlah 400 m lebar 4m harus itu dibangun tidak boleh ada pengembangan lain supaya pembangunan

fisik tersebut bagus. (wawancara pada hari Kamis tanggal 21 November 2013, pukul 10.00 WIB).

Pelaksanaan pembangunan fisik desa Pucangro telah memenuhi target dan realisasi. Berdasarkan data diatas, bahwa dikatakan sudah memenuhi target karena sesuai dengan RAP dan dari RAP tersebut ukuran pembangunan fisik serta dana pembangunan tidak boleh memenuhi target dan realisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat efektivitas dana yang sudah direalisasikan. Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Fitriyah selaku staf umum menyatakan bahwa :

“Menurut saya, untuk keefektifannya sudah memenuhi efektiflah kan kita mengajukan dana dapatnya dari pemerintah segitu kan kita berusaha merencanakan dan mengukur tingkat pencapaiannya kebutuhan pembangunan fisik tersebut.. Dana dapatnya sekian kita kan gak mungkin merencanakan melebihi target ya gak mungkin jadi kita harus bisa memastikan dengan dana tersebut kita harus bisa membangun dengan hasil yang baik. Jika dananya kurang yang dilakukan instansi ini sementara kita ambilkan dulu dari dana PAD terus mengajukan proposal lagi untuk tahun berikutnya nanti diteruskan lagi barangkali kita dapat bantuan dari pemerintah bukan dari PAD tidak apa-apa..”. (wawancara pada hari Jumat tanggal 22 November 2013, pukul 08.00 WIB)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa ditempat kerjanya memaparkan bahwa :

“Menurut pendapat saya sudah efektif, artinya sesuai RAP yang sudah kita ajukan, Cuma untuk dana – dana yang lain tetap dibutuhkan karena desa pucangro ini terdapat 8 dusun kita gak mungkin sekali membangun akhirnya tercapai semuanya kan gak mungkin. Semua tersebut tidak menyimpang dari RAP. Cara mengatasi kekurangan dana sudah saya jelaskan di awal semua pembangunan berdasarkan musyawarah desa disitu ada swadaya dari masyarakat tidak harus pakai nominal, bisa juga pakai tenaga kerja mungkin bisa menyumbang katakanlah material berupa semen tidak seluruhnya”.

(wawancara pada hari Jumat tanggal 22 November 2013, pukul 09.00 WIB).

Untuk mengetahui belanja pembangunan Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tahun 2010 dapat diketahui pada tabel 11 berikut ini :

Tabel 11 Belanja Pembangunan Desa Pucangro Tahun 2010

No	Jenis Belanja Modal	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1.	Belanja Modal	80.010.077	72.827.094	0,91 %
1.1.	Belanja Modal Tanah			
1.2.	Balanja Modal Jaringan			
1.3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor			
1.4.	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor			
1.5.	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Bermotor			
1.6.	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Tidak Bermotor			
1.7.	Belanja Modal Alat-Alat Bengkel			
1.8.	Belanja Modal Alat-Alat Pertanian dan Perternakan			
1.9.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.770.000	3.170.000	0,84 %
1.10.	Belanja Modal Kontruksi Jalan	59.586.105	59.586.989	1 %
1.11.	Belanja Modal Kontruksi Jembatan			
1.12.	Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon			
1.13.	Belanja Modal Kontruksi Bangunan Gedung	16.653.972	10.070.989	0,6 %
1.14.	Belanja Modal Buku Perpustakaan			
1.15.	Belanja Modal Tanaman, Hewan Ternak			

Sumber : Laporan APBDes Tahun 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dana dari pemerintah daerah Desa Pucangro pada tahun 2010 digunakan untuk belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, belanja modal kontruksi jalan, dan belanja modal kontruksi bangunan gedung. Untuk mengetahui belanja pembangunan Desa Pucangro Tahun 2011 pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12 Belanja Pembangunan Desa Pucangro Tahun 2011

No	Jenis Belanja Modal	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1.	Belanja Modal	72.547.000	65.693.000	0,9 %
1.1.	Belanja Modal Tanah			
1.2.	Belanja Modal Jaringan			
1.3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor			
1.4.	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor			
1.5.	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Bermotor			
1.6.	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Tidak Bermotor			
1.7.	Belanja Modal Alat-Alat Bengkel			
1.8.	Belanja Modal Alat-Alat Pertanian dan Perternakan			
1.9.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.170.000	6.808.000	2,14 %
1.10.	Belanja Modal Kontruksi Jalan	59.585.000	59.585.000	100 %
1.11.	Belanja Modal Kontruksi Jembatan			
1.12.	Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon			
1.13.	Belanja Modal Kontruksi Bangunan Gedung	9.792.000	9.792.000	100 %
1.14.	Belanja Modal Buku Perpustakaan			
1.15.	Belanja Modal Tanaman, Hewan Ternak			
1.1.6	Belanja Modal Peralatan Kesehatan/Kesehatan Lingkungan			

Sumber : Laporan APBDes Tahun 2011 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dana dari pemerintah daerah Desa Pucangro pada tahun 2011 sama seperti pembangunan yang dilakukan pada tahun 2010. Untuk mengetahui belanja pembangunan Desa Pucangro Tahun 2012 pada tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13 Belanja Pembangunan Desa Pucangro Tahun 2012

No	Jenis Belanja Modal	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1.	Belanja Modal	89.760.000	89.860.000	1 %
1.1.	Belanja Modal Tanah			
1.2.	Belanja Modal Jaringan			
1.3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor			
1.4.	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor			
1.5.	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Bermotor			
1.6.	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Tidak Bermotor			
1.7.	Belanja Modal Alat-Alat Bengkel			
1.8.	Belanja Modal Alat-Alat Pertanian dan Perternakan			
1.9.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.675.000	5.775.000	1,01 %
1.10.	Belanja Modal Kontruksi Jalan	59.585.000	59.585.000	
1.11.	Belanja Modal Kontruksi Jembatan			
1.12.	Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon			
1.13.	Belanja Modal Kontruksi Bangunan Gedung	24.500.000	24.500.000	100 %
1.14.	Belanja Modal Buku Perpustakaan			
1.15.	Belanja Modal Tanaman, Hewan Ternak			
1.1.6	Belanja Modal Peralatan Kesehatan/Kesehatan Lingkungan			

Sumber : Laporan APBDes Tahun 2012 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pembangunan Desa Pucangro pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kegiatan pembangunan fisik Desa Pucangro dilakukan untuk memenuhi sarana dan prasarana masyarakat. Dana untuk pembuatan jalan lebih besar dari dana pembangunan untuk gedung.

Berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti efektifitas dana pembangunan fisik desa pucangro ini dari tahun 2010 sampai 2012 dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi target dan realisasi yang telah ditentukan dan semua sesuai pada RAP serta tidak boleh ada pengembangan diluar data yang sudah diajukan. Namun, tidak efesien karena tidak memenuhi kualitas yaitu disisi lain manfaat dari pembangunan fisik desa tersebut daya guna pembangunan kurang dirasakan oleh masyarakat karena pembangunan yang sudah dilakukan belum sampai satu tahun mengalami kerusakan dan tidak layak pakai.

Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga (Bapak A) di rumahnya yang berada pada pembangunan jalan pada tahun 2011 di Dusun Sidodadi memaparkan bahwa :

“Saya tidak menegtahui adanya pembangunan tersebut karena kepala dusun sini tidak pernah mengadakan musyawarah, tau – tau ada proyek yang mau membangun sarana dan prasarana tersbut. Pembangunan fisik tersebut menurut saya tidak baik karena belum ada waktu setahun saja sudah rusak sudah kelihatan makadamnya padahal masa yang ditentukan biasanya kurang lebih selama 5 tahun namun pada kenyataannya tidak mencapai setahun saja sudah rusak mungkin saja material yang diberikan kurang memenuhi mbak. Pembangunan yang harus dilaksanakan itu sesuai dengan tanggapan dan dana yang ada tidak dibuat buat oleh pelaksana pembagian dana pembangunan karena dilihat dari hasilnya yang masih kurang memadai serta kami

kurang puas dalam menikmati pembangunan tersebut”. (wawancara pada hari Senin tanggal 25 November 2013, pukul 16.00 WIB)

Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga (Bapak B) di rumahnya selaku pemilik toko bangunan di Dusun Sidodadi memaparkan bahwa :

“Jadi gini mbak.. pihak instansi kelurahan meminta kwitansi sendiri dan ditulis sendiri, jadi pihak toko bangunan tidak mengetahui berapa harga yang ditulis untuk syarat pelaporan di LPJ. Akan tetapi sepengetahuan saya pihak dinas hanya membeli misalnya 4 sak semen, namun mereka menulis sendiri dibon kwitansi menjadi 6 semen”. (wawancara pada hari Senin tanggal 25 November 2013, pukul 17.00 WIB)

Untuk lebih jelas dan memperkuat hasil wawancara peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga (Bapak C) di rumahnya selaku salah satu kuli pembangunan di Desa Pucangro memaparkan bahwa :

“Pembangunan yang dilakukan disini gini mbak, pihak staf pembangunan memberikan bahan pokok bangunan dan kadang dikurangi mbk.. jika ada salah satu warga yang meminta sedikit saja untuk memperbaiki pembangunan jalan didepan rumahnya terkadang pegawai pembangunan meminta warga membeli bahan bangunan sendiri padahal itu semua masuk ke dalam tanggung jawab pihak instansi”. (wawancara pada hari Senin tanggal 25 November 2013, pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dana pembangunan fisik Desa Pucangro efektif karena realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien dikarenakan tidak memenuhi kualitas serta daya guna pembangunan atau hasil akhir masyarakat kurang merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut karena tidak memenuhi masa yang cukup panjang belum ada satu tahun

jalan yang dibangun sudah tidak mulus lagi akan tetapi layaknya jalan kerikil alias makadam bukan jalan berbentuk aspal.

2. Faktor pendukung dan penghambat efektifitas dana pembangunan fisik desa

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan fisik desa terkait realisasi dari anggaran untuk pembangunan fisik tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambat. Kedua faktor tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pembangunan fisik di Desa Pucangro terkait realisasi anggaran pembangunan. Dan faktor pendukung serta penghambat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

Faktor – faktor yang mendukung dalam efektifitas dana pembangunan fisik desa agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan fisik desa yang diungkapkan oleh Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa dan Ibu Fitriyah selaku staf umum adalah sebagai berikut :

1. Sumber Dana dari Pemerintah

Sumber dana dari pemerintah seperti ADD, dana stimulan khusus, PNPM, dimana penyerahan urusan itu dari pemerintah kabupaten. Pemerintah memberikan bantuan dari dana pemerintah bisa ADD, PNPM, P2SPP. Akan tetapi, biasanya untuk ADD turunnya 100 % itupun harus dengan bantuan lembaga-lembaga LPMD, Karang taruna itu lembaga. LPMD adalah yang bertugas dalam pembangunan fisik.

2. Sumber Dana Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

Swadaya dan partisipasi masyarakat itu contohnya bisa uang, bisa juga tenaga ataupun barang. Masyarakat yang ekonomi tinggi bisa menyumbang lebih banyak atau menyumbang sebuah jasa tenaga. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan dari pembangunan fisik tersebut, karena masyarakat adalah salah satu kunci yang mendasar.

3. Adanya Tingkatan Masyarakat

Adanya tingkatan masyarakat disini maksudnya masyarakat tidak sama mungkin pembangunan di Dusun Sidodadi tahun 2011 penduduknya memang mayoritas pengusaha. Jadi, untuk swadaya masyarakat kita menggalinya juga cukup mudah untuk pembangunan. Swadaya masyarakat ini dapat membantu anggaran pembangunan meskipun itu dapat bantuan dari pemerintah sekian swadayanya banyak yang berupa uang akhirnya bisa mengembangkan pembangunan tersebut.

b. Faktor Penghambat

Faktor – faktor yang menghambat dalam efektifitas dana pembangunan fisik desa agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan fisik desa yang diungkapkan oleh Bapak Langgeng Wahyudi selaku sekretaris desa dan Ibu Fitriyah selaku staf umum adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Dana

Keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah mempengaruhi pembangunan fisik desa. Sehingga pembangunan fisik yang minta lebih panjang ukurannya misalnya berapa meter yang telah ditentukan ternyata hanya bisa tercapai sekian meter itu pasti ada rasa kekecewaan sedikit. Kemudian, terkadang adanya masyarakat yang waktu setelah dibangun untuk pemeliharannya kurang memperhatikan.

2. Pengusulan Dana Biasanya Selain ADD Sudah Mengajukan Proposal Banyak Sekali Tetapi Tidak Terealisasi

Pengusulan dana biasanya selain ADD sudah mengajukan proposal banyak sekali tetapi tidak terlealisasi, disana terbengkalai tidak ada balasan lagi akhirnya pihak desa menanti sampai akhir tahun tidak ada jawaban dari pemerintah. Pihak desa sudah melakukan pengajuan dana lagi tetapi kenyataannya tidak ada jawaban. Hal ini disebabkan, disana juga tidak hanya satu dua desa yang mengajukan tentunya juga banyak desa yang mengajukan.

3. Sebelum Pengajuan Dana ke Pemerintah Kabupaten Terlebih Dahulu Mengajukan RAP Terkadang Ada Pelelangan Harga Bahan Pokok Bangunan

Maksud dari pelelangan harga bahan pokok bangunan disini adalah harga bahan pokok bangunan tidak pasti pada saat ini dilelang harga sekian oleh toko ternyata Kantor Balai Desa Pucangro

mengajukan ke pemerintah Kabupaten Jombang dana itu sudah tidak efektif. Kemudian, kadang kala juga untuk tanda tangan ke Pak Camat ternyata Pak Camatnya tidak ada dikantor. Sehingga, hal ini tentu akan menghambat Desa Pucangro untuk pengajuan dana dan terbengkalai oleh waktu.

C. Pembahasan

1. Efektifitas dana pembangunan fisik di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

a. Kegiatan pembangunan fisik desa

Kegiatan pembangunan fisik di Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dilakukan untuk menunjang sarana dan prasana masyarakat salah satunya dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan fisik tidak hanya dibutuhkan sebagai pelengkap sarana prasana masyarakat. Sebab masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menunjang kegiatan pembangunan fisik. Oleh karena itu, harus direncanakan dengan sebaik – baiknya untuk mencapai kondisi lebih baik lagi sehingga masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ali (2007:7) bahwa “pembangunan desa adalah sutau upaya perubahan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kondisi dan situasi yang lebih baik”

.Kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan Desa Pucangro pada tahun 2010 sampai tahun 2012 yaitu pembangunan jalan rabat beton Dusun Sidodadi, jalan rabat beton Dusun Pucangro, jalan rabat beton Dusun Berjel, jalan rabat beton Dusun Sidomulyo, pembangunan TPT, pembangunan tembok pagar TK Dusun Pucangro, dan bedah rumah Dusun Sidodadi. Kegiatan pembangunan fisik tersebut sesuai dengan pendapat Siagian (1985:31) menyebutkan bahwa aspek kependudukan dan fisik adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan – urusan pengaturan tata fisik lingkungan pedesaan secara umum termasuk pengaturan tata fisik lingkungan pertanian, termasuk usaha – usaha perikanan, perkebunan rakyat, peternakan serta hal – hal yang berhubungan dengan sektor pertanian lainnya yang terdapat dipedesaan, prasarana – prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh kegiatan pembangunan fisik desa Pucangro dilakukan atas dasar musyawarah desa atau musrembangdes, kemudian dari tiap – tiap dusun mengusulkan atau mengutarakan keluhan pembangunan dusunnya masing – masing yang belum tercapai. Dalam musyawarah tersebut akan diambil sekala prioritas yang paling parah di dusun dengan kesepakatan semua pihak yang ikut dalam musyawarah tersebut termasuk RT, RW, Kasun, serta tokoh masyarakat.

b. Target dan realisasi dana untuk pembangunan fisik desa

Setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

pemerintah daerah berupaya mencari sumber – sumber keuangan. Kemudian ditunjang dengan PP No. 6 Tahun 2014 pasal 71 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Realisasi dana untuk pembangunan fisik desa tentunya sumber dana berasal dari pemerintah dan pemerintah mempunyai tugas mengatur keuangan desa agar pembangunan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa, menganalisa keuangan, dan mengerti administrasi keuangan yang mencakup anggaran statistik berkaitan dengan keuangan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Surianingrat (1981:117) menjelaskan bahwa tujuan utama Keuangan Desa adalah adanya keseimbangan neraca antara penggunaan sumber keuangan dan pembagian pengeluaran, yang dapat memberi hasil sebesar mungkin dalam realisasi rencana

Berdasarkan hasil penelitian sumber keuangan desa berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat, rincian dana pembangunan di masukkan ke dalam buku APBDes kemudian di rekap dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini diperkuat dengan pendapat Swignjo (1989:207) sumber keuangan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sendiri, pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dan lain – lain pendapatan yang sah. Terkait sumber dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut untuk sebuah

kegiatan pembangunan tentunya ada suatu mekanisme atau proses pengucuran dana sehingga dana yang diajukan dapat terealisasi.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi dana pembangunan fisik desa Pucangro cukup meningkat dan sudah memenuhi target yang telah diajukan. Dalam tiga tahun berturut yaitu tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012, realisasi dana pembangunan fisik mencapai target yang diharapkan. Meskipun kenaikan realisasi dana pembangunan fisik pada tahun 2010 sebesar 5,54%, tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 23,82%, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan, akan tetapi realisasi tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,44%. Hal ini dapat dikatakan bahwa realisasi dana pembangunan fisik desa Pucangro mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2012

c. Pelaksanaan pembangunan fisik desa

Pelaksanaan pembangunan fisik Desa Pucangro sudah memenuhi target dan realisasi karena pembangunan yang sudah direncanakan tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu sesuai dengan RAP. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dana yang sudah direalisasikan secara berkala. Serta pembangunan fisik yang dilakukan tidak melebihi rencana pembangunan dari pengajuan serta tidak menyimpang dari RAP.

Berdasarkan hasil penelitian, efektifitas dana pembangunan fisik desa pucangro ini dari tahun 2010 sampai 2012 dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi target dan realisasi yang telah ditentukan sesuai dengan

RAP serta tidak mengalami pengembangan pembangunan fisik dari ketentuan tersebut, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas waktu. Hal ini sesuai dengan pendapat Djumhana (2007:53) menjelaskan bahwa efektivitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcomes dengan output. Meskipun pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai rencana tidak ada pengembangan pembangunan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daya guna pembangunan fisik desa dapat dilihat dari kualitas pembangunan fisik yang sudah direalisasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Steers (1985:46,47,48) ukuran atau indikator efektivitas ada 19 salah satunya yaitu efektivitas keseluruhan mencapai semua sasarnya, kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi, kepuasan organisasi dari pembangunan fisik, dan penilaian oleh pihak luar. Kualitas, kepuasan, dan penilaian pihak luar organisasi merupakan ukuran efektivitas dana pembangunan fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

Terkait dengan hal tersebut, disini lain ditinjau dari hasil guna dari pembangunan fisik bahwa masyarakat kurang puas adanya pembangunan tersebut. Dapat dilihat realita pembangunan jalan, contohnya pembangunan jalan di Dusun Sidodadi pada tahun 2012 dan pembangunan jalan rabat beton Dusun Sidomulyo pada tahun 2012 yang berlangsung sejak tahun 2011 tersebut kurang memadai karena belum sampai kurun waktu satu

tahun jalan itu sudah tidak berbentuk aspal melainkan makadam. Sehingga dapat terlihat bahwa sudah efektif namun tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas atau waktu pembangunan. Kemudian jika dilihat dari kepuasan masyarakat pada dasarnya masyarakat kurang puas terkait sarana prasarana yang telah difasilitasi.

2. Faktor pendukung dan penghambat efektifitas dana pembangunan fisik desa

a. Faktor pendukung

1. Sumber Dana dari Pemerintah

Sumber dana pembangunan fisik desa Pucangro berasal dari pemerintah Daerah. Sumber dana dari pemerintah yaitu ADD, P2SPP, PNPM, Dana Stimulan Khusus, dan dana dari Dinas Pertanian. Sumber dana pembangunan dari pemerintah daerah tersebut dapat mendukung efektifitas dana pembangunan fisik di Desa Pucangro agar dapat berjalan sesuai yang sudah direncanakan.

Anggaran dari pemerintah memberikan bantuan yang cukup signifikan karena salah satu sumber dana terbesar adalah dari pemerintah yang terdiri dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah, serta sebagian pajak retribusi daerah yang diberikan kepada desa. Sumber dana tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suwignjo (1989:207) bahwa pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah Daerah yang

terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah, sumbangan dan bantuan pemerintah daerah, sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa. Demikian sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 menjelaskan sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, serta dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang disalurkan melalui kas desa.

2. Sumber Dana Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

Sumber dana pembangunan fisik desa Pucangro berasal dari swadaya masyarakat. Swadaya dan partisipasi masyarakat itu contohnya bisa uang, bisa juga tenaga ataupun barang. Masyarakat yang ekonomi tinggi bisa menyumbang lebih banyak atau menyumbang sebuah jasa tenaga. Adanya swadaya dan partisipasi masyarakat ini, dapat menjadi faktor pendukung efektifitas dana pembangunan fisik.

Dengan adanya bantuan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat, maka dapat menambah pendapatan keuangan desa. Bantuan tersebut menjadi faktor pendukung efektifitas dana pembangunan fisik, tentu saja dengan proses komunikasi yang baik dengan masyarakat. Tanpa adanya bantuan dana swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat, maka pendapat khas desa berkurang.

Sehingga, tentu akan menghambat pembangunan fisik itu sendiri, pemerintah desa harus bisa seefektif mungkin menggunakan sumber dana tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Steers (1985:209) menjelaskan bahwa dalam kebijakan dan praktek manajemen harus untuk meningkatkan efektifitas harus bisa memanfaatkan sumber daya serta menciptakan proses komunikasi dan pengambilan keputusan yang baik.

3. Adanya Tingkatan Masyarakat

Adanya tingkatan masyarakat maksudnya adalah di Dusun Sidodadi mayoritas masyarakatnya sebagai pengusaha. Jadi, untuk penggalan bantuan dana juga akan lebih mudah. Swadaya masyarakat ini bisa membantu penambahan anggaran pembangunan meskipun itu dapat bantuan dari pemerintah sekian swadayaanya banyak yang berupa uang akhirnya bisa mengembangkan pembangunan fisik tersebut.

Sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa yang digunakan untuk pembangunan fisik supaya masyarakat bisa terpenuhi akan kebutuhannya. Hal ini tentu berpengaruh pada berjalannya proses pembangunan fisik desa. Pemerintah desa harus bisa mengelola keuangan desa tersebut dengan baik. Peran pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa harus benar – benar meamahi dan mengerti seluk beluk penggunaan dana pembangunan fisik karena ada

desa yang banyak membangun tetapi anggaran desanya statis, mungkin dana tersebut tidak semua dia anggarkan akan tetapi pembangunan dilakukan secara gotong royong. Hal ini sesuai dengan pendapat Surianingrat (1981 : 120) mrnyatakan bahwa anggaran desa harus diartikan sebagai “barometer” kegiatan dan pembangunan desa seharusnya dapat dibaca dari perkembangan anggaran desa

b. Faktor penghambat

1. Keterbatasan Dana

Keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah mempengaruhi pembangunan fisik desa. Sehingga pembangunan fisik yang minta lebih panjang ukurannya misalnya berapa meter yang telah ditentukan ternyata hanya bisa tercapai sekian meter itu pasti ada rasa kekecewaan sedikit. Kemudian, terkadang adanya masyarakat yang waktu setelah dibangun untuk pemeliharannya kurang memperhatikan.

Keterbatasan dana tersebut menjadi salah satu faktor penghambat efektifitas dana pembangunan fisik. Sepertinya pemerintah kurang memperhatikan dan kurang cepat dalam menanggapi pengajuan dana. Hal ini tentu saja perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam hal pengajuan dana untuk pembangunan fisik Desa Pucangro karena dana tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan waktu yang sudah ditentukan.

2. Pengusulan Dana Biasanya Selain ADD Sudah Mengajukan Proposal Banyak Sekali Tetapi Tidak Terealisasi

Pengusulan dana biasanya selain ADD sudah mengajukan proposal banyak sekali tetapi tidak terlealisasi, disana terbengkalai tidak ada balasan lagi akhirnya pihak desa menanti sampai akhir tahun tidak ada jawaban dari pemerintah. Pihak desa sudah melakukan pengajuan dana lagi tetapi kenyataannya tidak ada jawaban. Hal ini disebabkan, disana juga tidak hanya satu dua desa yang mengajukan tentunya juga banyak desa yang mengajukan.

Pengusulan dana yang terbengkalai tersebut tentunya menjadi faktor penghambat dalam efektifitas dana pembangunan fisik. Sebaiknya pemerintah lebih teliti lagi dalam melihat proposal pengajuan dana pembangunan fisik desa. Sehingga, dapat mengurangi faktor penghambat dalam meningkatkan efektifitas dana pembangunan fisik Desa Pucangro.

3. Sebelum Pengajuan Dana ke Pemerintah Kabupaten Terlebih Dahulu Mengajukan RAP Terkadang Ada Pelelangan Harga Bahan Pokok Bangunan

Maksud dari pelelangan harga bahan pokok bangunan disini adalah harga bahan pokok bangunan tidak pasti pada saat ini dilelang harga sekian oleh toko ternyata Kantor Balai Desa Pucangro mengaajukan ke pemerintah Kabupaten Jombang dana itu sudah tidak

efektif. Kemudian, kadang kala juga untuk tanda tangan ke Pak Camat ternyata Pak Camatnya tidak ada di kantor. Sehingga, hal ini tentu akan menghambat Desa Pucangro untuk pengajuan dana dan terbengkalai oleh waktu.

Adanya pelelangan harga bahan pokok bangunan, sebaiknya pihak pemerintah desa pucangro mengecek terus harga pokok bahan bangunan ke toko bangunan agar ketika diajukan ke pemerintah Kabupaten Jombang rincian dana tersebut sesuai dengan awal rencana anggaran pembangunan. Akan tetapi, pemerintah kecamatan dan kabupaten juga harus memperhatikan rencana anggaran pembangunan tersebut dan harus lebih teliti dalam menyeleksi pencairan dana tersebut. Sehingga, dengan pihak pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sama – sama memperhatikan pengajuan anggaran pembangunan, maka akan mengurangi faktor penghambat tersebut.